

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Yang berwenang menyelesaikan sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH berdasarkan ketentuan yang berlaku, harus ditentukan berdasarkan karakter objek sengketa. Meskipun akad murabahah pada prinsipnya termasuk dalam ranah ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, dalam perkara ini sengketa berkaitan dengan wanprestasi dan penarikan kendaraan sebagai objek jaminan fidusia. Karena jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan pelaksanaannya memerlukan penilaian yudisial, maka sengketa tersebut tidak termasuk kewenangan BPSK. Dengan demikian, kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa berada pada Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg.
2. Penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg, sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH bukan merupakan sengketa konsumen, melainkan sengketa perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan jaminan fidusia. Oleh karena itu, pengadilan membatalkan Putusan

BPSK Kota Padang karena dinilai telah melampaui kewenangan (*ultra vires*). Putusan tersebut menegaskan penyelesaian sengketa pembiayaan dengan jaminan fidusia berada dalam hukum perdata dan jaminan kebendaan, serta membatasi kewenangan BPSK hanya pada sengketa perlindungan konsumen yang tidak berkaitan dengan hak kebendaan.

3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN PdG yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025, didasarkan pada asas legalitas kewenangan, kompetensi absolut, dan asas *lex specialis derogat legi generali*. Hakim menilai bahwa sengketa yang berkaitan dengan jaminan fidusia sebagai hak kebendaan tunduk pada Undang-Undang Jaminan Fidusia dan berada dalam yurisdiksi peradilan, sehingga BPSK tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Pertimbangan ini juga memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan mekanisme eksekusi fidusia melalui pengadilan. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan konsistensi sistem hukum dalam menjaga kepastian hukum dan pembagian kewenangan antar lembaga penyelesaian sengketa.

B. Saran

1. Saran bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislator dan Pemerintah).
Pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan mengenai penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah

dengan jaminan fidusia dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Perbankan Syariah, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketidaksinkronan norma yang ada saat ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan eksplisit mengenai batas kewenangan BPSK dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan hak kebendaan, khususnya jaminan fidusia, guna menjamin kepastian hukum dan mencegah dualisme yurisdiksi.

2. Saran bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BPSK sebagai lembaga quasi-yudisial perlu memperkuat pemahaman mengenai batas kewenangan normatifnya, khususnya terkait sengketa yang melibatkan perikatan pembiayaan dan jaminan kebendaan. Dalam menerima dan memeriksa perkara, BPSK harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dengan melakukan uji kompetensi absolut sebelum memutus perkara. BPSK juga perlu menyusun pedoman internal atau standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai klasifikasi sengketa konsumen dan sengketa perdata murni, sehingga tidak terjadi putusan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*).

3. Saran bagi Lembaga Pembiayaan Syariah dan Pelaku Usaha.

Lembaga pembiayaan syariah, termasuk PT Adira Dinamika Multi Finance dan perusahaan pembiayaan lainnya, perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pelaku

usaha harus memastikan bahwa penarikan objek fidusia dilakukan berdasarkan persetujuan debitur atau melalui mekanisme peradilan. Selain itu, klausul perjanjian pembiayaan perlu dirumuskan secara transparan, adil, dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sesuai dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Manan, 2018, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad, N, 2020, *Perbankan Syariah di Indonesia: Teori dan Praktik*, UGM Press, Yogyakarta.
- Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Jefry Tarantang, 2018, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, K-Media, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Rony Hanitijo Soemitro, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Salim HS, 2021, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sari, Fatrullah Puspita, 2024, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Mega Press Nusantara, Sumedang.
- Soegeng Wahyoedi Saporso, 2019, *Loyalitas Nasabah Bank Syariah: Studi atas Religiusitas, Kualitas Layanan, Trust, dan Loyalitas*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.

Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Suadi, H. Amran, 2019, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.

Yadi Janwari, 2015, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Zainudi Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg.

C. Sumber Lain

Abdul Rasyid, 2019, 'Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah', *Jurnal Yudisial*, Volume 12, Nomor 2, 2019.

Abdul Wahab, 2023, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan Di Indonesia', *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islame*, Volume 24, Nomor 1, 2023.

Abu Alim, 2025, 'Transaksi Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam: Menelusuri Batas Halal-Haram Antara Riba, Bunga Bank, Dan Praktik Syariah', *JSE: Jurnal Sharia Economica*, Volume 4, Nomor 3, 2025.

- Adhi Yudha Ristanto, 2024, Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Pasca Perma Nomor 7 Tahun 2022, *Idn.J.of Legality of law*, Volume 6, Nomor 2, 2024.
- Aidil Firmansyah, 2024, 'Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi', *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 2, 2024.
- Akbar Hidayatullah, 2023, 'Penyelesaian Sengketa Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadih Tasikmalaya', *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 4, 2023.
- Alzasyah Bachsin, 2025, 'Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2025.
- Budianto, A, 2017, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Fungsi dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 15, Nomor 47, 2017.
- Brigita Cindy, 2023, 'Implikasi Dan Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Dalam Hal Debitur Wanprestasi', *Privat Law*, Volume 11, Nomor 2, 2023.
- Daffa Arya Prayoga, et all, 2023, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional', *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 2, Nomor 2, 2023.
- Daman Huri, 2022, 'Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia Dalam Praktik', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Volume 03, Nomor 03, 2022.
- Danel Aditia Situngkir, 2023, 'Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum', *Ensiklopedia of Journal*, Volume 5, Nomor 4 Edisi 1, Juli 2023.
- Dija Hedistira, 2020, 'Kepemilikan Dan Penguasaan Objek Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit', *Jurnal Privat Law*, Volume VIII, Nomor 1, 2020.
- Dzaky Agusthomi, 2022, 'Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan dalam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Volume 6, Nomor 3, 2022.
- Edi Wahjuningati, 2024, 'Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sehubungan Doktrin Ultra Vires terkait Tindakan Organ Perseroan Terbatas di Luar Ketentuan Anggaran Dasar', *Jurnal Rechtsens*, Volume 13, Nomor 2, 2024.

- Eliana Denggan Trianita, et all, 2021, 'Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia', *Diponegoro Private Law Review*, Volume 8, Nomor 2, 2021.
- Fadly Andrianto, 2020, 'Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia', *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3, Nomor 1, 2020.
- Fairuz Afra, et all, 2022, 'Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia', *Diponegoro Private Law Review*, Volume 9, Nomor 1, 2022.
- Fajar Sugianto, 2020, 'Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 3, Nomor 2, 2020.
- Fani Holidayani, 2024, 'Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Muncikari', *Bina mulia Hukum*, Volume 13, Nomor 2, 2024.
- Fauziah Lubis, 2025, 'Upaya Hukum Dalam Putusan Perkara Perdata', *Jurnal Relevansi Hukum Nusantara*, Volume 8, Nomor 2, 2025.
- Ficha Melina, 2020, 'Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)', *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Volume 3, Nomor 2, 2020.
- Fuad Fatkhurrahman, 2023, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6, Nomor 2, 2023.
- Ghonyah Zulindah, 2023, 'Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia', *HUKMY : Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2023.
- Hafis Tohar, 2022, 'Jaminan Fidusia Sebagai Hak Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Jaminan Fidusia', *Eksekusi: Journal Of Law*, Volume 4, Nomor 1, 2022.
- Hidayat Andyanto, 2019, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Menggunakan Jaminan Fidusia', *Jurnal Jendela Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2019.
- Hilda Hilmiah Dimyati, 2018, 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal', *Jurnal Cita Hukum*, Volume II, Nomor 2, Desember 2018.
- H. Syahrudin, 2018, 'Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Pleno De Jure*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2018.

- Indah Sari, 2019, 'Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 9, Nomor 2, 2019.
- Jenia, 2017, 'Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah', *AL Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Jainudin Basri, 2022, 'Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 4, Nomor 2, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2017, *Konsumen*, 11 November 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Leode, R. M., Moonti, R. M., & Ahmad, I., 2025, 'Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2025.
- Mario Julyano, 2019, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, 2019.
- Meila Fatma, 2020, 'Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kuhperdata Dalam Perjanjian Kartu Kredit', *Alethea Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2020.
- Muhamad Habibullah, et all, 2025, 'Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara', *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 3, Nomor 2, 2025.
- Muhammad Ikhlas, 2022, 'Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah (Analisis Komparasi)', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 11, Nomor 2, 2022.
- Muhamad Kholid, 2018, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', *Asy-Syari'ah*, Volume 20 Nomor 2, 2018.
- M. Yasir, 2016, 'Aspek Hukum Jaminan Fidusia', *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Volume 3, Nomor 1, 2016.
- Nafisatul Muna, 2022, 'Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah', *Jurnal Sahmiyya*, Volume 1, Nomor 2, 2022.
- Ni Made Trisna, 2022, 'Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata', *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Volume 5, Nomor 1, 2022.

- Noer Yasin, 2022, 'Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Volume 4, Nomor 2, 2022.
- Nugroho, L, 2022, 'Akad Murabahah', *Dalam Akad-Akad Bank Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN, Lhokseumawe, 2022.
- Nur Azza Morlin, 2022, 'Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku', *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Volume VI, Nomor 2, 2022.
- Nur Suprianto Sukanto, 2024, 'Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili Sengketa yang Bersumber pada Wanprestasi dalam Jual Beli', *Action Research Literate*, Volume 8, Nomor 6, Juni 2024.
- Olivia Rizka Vinanda, 2024. 'Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Perdata: Perspektif Non-Ligitasi', *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Volume 1, Nomor 10, 2024.
- Pahrudin Azis, 2024, 'Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi', *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2024.
- Rahmi Rimanda, 2019, 'Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2019.
- Riski Pardinata, 2023, 'Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)*, Volume VI, Nomor 2, 2023.
- Risma Khuzaimatul, 2025, 'Tantangan Transparansi Harga dalam Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah', *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, Volume 04, Nomor 01, Tahun 2025.
- Rizky Akbar Siregar, et all, 2022, 'Studi Literatur Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia', *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4, Nomor 2, 2022.
- Rose Panjaitan, 2018, 'Pengaturan Dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata', *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2018.
- R. Tony Prayogo, 2016, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang

- Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 02, 2016.
- Santy fitnawati, et all, 2025, 'Akibat Hukum Dari Suatu Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia', *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Volume 3, Nomor 1, 2025.
- Saly, J. N., & Muda, Z. A., 2023, 'Analisis Putusan Pengadilan Agama Pada Dudukan Perkara Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa Dsn Mui No: 04/Dsn-Mui/2000 Tentang Murabahah', *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2023.
- Sri Nur Hari, 2020, 'Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan', *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3, Nomor 3, September 2020.
- Sri Puspitaningrum, 2018, 'Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan', *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 15, Nomor 2, 2018.
- Sriono, 2019, 'Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 07, Nomor 02, 2019.
- Sudjana, 2019, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihakdalam Transaksi Anjak Piutang', *VeJ*, Volume 5, Nomor 2, 2019.
- Surayya Fadhilah, 2021, 'Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VI, Nomor 1, 2021.
- Yuni Yanti, 2021, 'Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Volume 1, Nomor 1, 2021.
- Yoepi Afdaruqutni, 2024, 'Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Perdata', *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Volume 01, Nomor 02, Oktober 2024.
- Yusup Anchori, 2020, 'Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia', *Jurnal Syntax Admiration*, Volume 1, Nomor 8, Desember 2020.
- Zir Nuriyah Mustari, 2023, Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara (Analisis Perkara Putusan No.

13/Pdt.G/2020/PN Pmk), *Jurnal Yustitia*, Volume 24, Nomor 2, Desember 2023.